

# PANDUAN PRAKTIS PERENCANAAN PENYEDIAAN PANGAN

#### UNTUK PEMERINTAH DAERAH

| Dr.Ir.Yayuk FB, MS dan Wilaga AK, SE.,MSi | | Pangan Lokal Indonesia | | 2018 | | Edisi 1 - 2018

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

SILAKAN DIBAGIKAN SELUAS-LUASNYA, DENGAN MENCANTUMKAN SUMBERNYA.

#### baik, sebelum kita mulai,

Barangkali sebagian besar dari kita pernah mendengar ungkapan berikut.

# "SOAL PANGAN ADALAH SOAL HIDUP-MATINYA BANGSA"

Kalender menunjukkan sepertiga bulan November 2018, ketika ebook ini ditulis dan bencana sedang melanda beberapa daerah di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama masyarakat terdampak bencana adalah **sulitnya** akses untuk makanan dan minuman.

Anda bisa bayangkan,

lahan pertanian rusak, toko-toko hancur, akses dari dan ke daerah terdampak bencana terputus, otomatis hilanglah akses masyarakat untuk memeroleh pangan yang cukup, dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Maka, gagasan *founding father* di atas, mengenai posisi strategisnya pangan dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa, **masih dan akan terus** relevan.

Tujuh puluh tiga tahun Republik Indonesia telah berdiri.

gagasan Presiden Soekarno telah berlalu enam puluh enam tahun yang lalu, seiring perkembangan teknologi dan informasi, kini telah banyak instrumen yang digunakan untuk mengurai permasalahan pangan, baik di sisi ketersedian pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, dan pemanfaatan pangan di negeri ini (Gambar 1).

Permasalahannya sekarang, sudah seberapa efektifkah kita menggunakan instrumen ini? Sudah seberapa jauh pencapaian kita terhadap perencanaan yang telah disusun?



Gambar 1 Sistem Ketahanan Pangan

Sering kali kita terjebak dengan teknis angka per angka, puas dengan penemuan angka-angkat tersebut, kemudian mengaburkan tujuan utamanya.

*E-book* ini membahas secara ringkas:

bagaimana menyeleraskan hasil analisis dari instrumen perencanaan penyediaan pangan dengan peran Pemerintah Daerah sebagai *leader* dalam mencapai ketahanan pangan di daerah.

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

#### Perkenalan

Sebelum memulai pembahasan pada *e-book* ini, izin kami memperkenalkan diri.

Kami terhimpun pada *brand* Pangan Lokal Indonesia (www.panganlokalindonesia.co.id), berkedudukan di Bogor.

Suatu lembaga profesional yang fokus pada pembangunan ketahanan pangan daerah selama 10 tahun terakhir, telah yang membangun kerja sama yang terpercaya dengan puluhan pemerintah daerah



untuk keperluan konsultasi dan kajian dokumen perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan daerah.



Kami juga mempraktekan perencanaan makro tersebut di tingkat mikro, dengan menyelenggarakan pelatihan pengolahan pangan lokal dengan teknologi tepat guna untuk mencapai skala usaha berkelanjutan, yang telah

memiliki **ribuan alumni** dari berbagai elemen masyarakat dari **puluhan daerah se-Indonesia**.

Tidak hanya sekadar teori, kami mempraktekan dalam bisnis pengolahan tepung talas menjadi produk berdaya saing, telah tembus kelayakan pengolahan pangan yang baik pada tingkat usaha rumah tangga dari Dinas

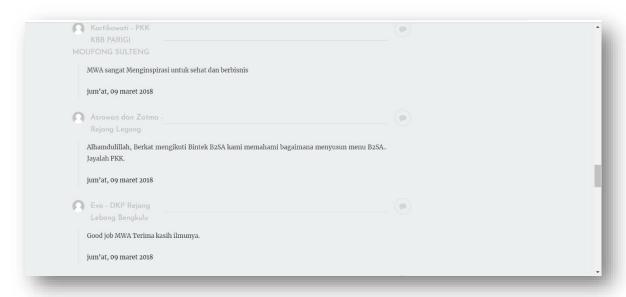


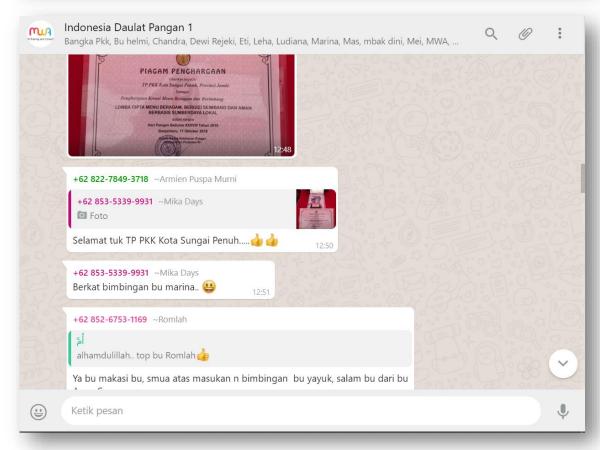
Kesehatan Kabupaten Bogor (P-IRT) dan **kelayakan halal pada bahan dan proses** yang kami gunakan dari BPPOM MUI Jawa Barat (Halal). Memiliki nama dan rasa yang kekinian, melalui Chocobro, olahan umbi lokal Bogor, telah menembus kotakota besar di Indonesia, melalui pemasaran offline dan **online**. Chocobro dirancang sebagai **model yang berhasil** dari pemanfaatan pangan lokal bercita rasa global. (https://www.instagram.com/chocobro.id/)

Setahap demi setahap, kami memulai proses **digitalisasi instrumen pembangunan ketahanan pangan daerah.** Perincian mengenai hal ini akan ada *e-book* tersendiri, karena catatan kami yang dapat **mudah-mudahan** dapat menginspirasi Anda tidak cukup pada pembahasan satu paragraf.. he he..

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

#### Dan berikut adalah alumni Pangan Lokal Indonesia.





Perkenalan kita lanjutkan pada setiap interaksi kita yang bermanfaat ke depannya insyaallah.

## "Where there is unity There is always victory"

Publilius Syrus (85 -43 SM)

#### DUA ALASAN MENGAPA MULAI DARI KETERSEDIAAN PANGAN

Ungkapan kuno tersebut memberikan kita saran bahwa penyamaan persepsi menentukan prestasi.

Setidaknya, ada tiga alasan mengapa *e-book* yang pertama kali diterbitkan oleh Pangan Lokal Indonesia ini, membahas mengenai ketersediaan pangan, dari semua subsistem ketahanan pangan yang ada, yaitu:

1. Ketersediaan pangan menjamin preferensi konsumsi.

Bayangkan hari Senin esok, Anda diundang rapat di Bappelitbangda yang baru pindah ke di pusat pemerintahan yang baru.

Undangan memberi tahu Anda rapat akan dimulai pukul 09.00 hingga 15.00.

Sewajarnya pusat pemerintahan yang baru, daerah sekitar belum berkembang. Warung hanya satu-dua dan itu pun sejauh 200 meter dari ruang rapat Anda.

Dan sewajarnya rapat satu hari *full*, panitia menyediakan dua kali snack dan satu kali makan siang.

Pertanyaannya, apa yang Anda makan untuk snack dan makan siang? Tentunya, apa yang tersaji di hadapan Anda, dua kali snack dan *lunch box*.

Walaupun Anda dalam diet gizi seimbang, ketika yang tersedia di *snack box* dan *lunch box* serba karbohidrat tanpa sayur dan buah, Anda akan libur diet pada hari itu. *Ya atau ya?* 

Kasus kecil yang sehari-hari ini kita temui merupakan cerminan masyarakat kita.

Ketika sosialisasi konsumsi mengenai gizi seimbang telah kita laksanakan kepada seluruh masyarakat, kecuali pedagang di pasar, stok di pasar akan menyediakan

seperti biasanya sebelum sosialisasi, dan perlahan-lahan masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi terbiasa dengan kondisi semula karena mau tidak mau mengonsumsi barang yang tersedia untuk dibeli.

Ilustrasi singkat ini menjelaskan bahwa ketersediaan pangan menjadi prasyarat konsumsi pangan masyarakat, yang pada pembahasan berikutnya, konsumsi masyarakat menjadi salah satu **keberhasilan ketahanan pangan daerah.** 

"mau tidak mau, masyarakat mengonsumsi barang yang tersedia untuk dibeli."

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

#### 2. Ketersediaan pangan menjamin stabilitas harga dan sosial

Sebagaimana interaksi antara pelaku ekonomi di pasar, harga komoditas akan turun seiring meluapnya stok komoditas tersebut di tengah-tengah interaksi pasar, begitu sebaliknya.

Fenomena ini berlaku baik pada komoditas strategis, yang menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat, maupun pada komoditas yang bukan strategis.

Sementara itu, perilaku para spekulan akan menggeser tingkat harga dan jumlah komoditas, terutama pada komoditas pangan strategis.

"pemerintah
daerah
melaksanakan
kebijakan
stabilitas
pasokan dan
harga pangan,"

Secara praktis, akibat dari hal ini adalah harga yang tidak stabil, lebih sering berakibat harga yang melambung tinggi.

Masalah yang juga dapat timbul adalah hilangnya komoditas strategis.

Masyarakat sulit mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Antiran mengular dimana-mana. Pada tingkat tertentu, tidak tersedianya pangan di pasar akan menyebabkan tingginya harga pangan dan

kemarahan penduduk.

Stabilitas ketersediaan pangan, yang sumbernya dapat berasal dari produksi atau pasokan, menjadi hal strategis, sebagaimana tercantum pada Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang makna isinya **pemerintah daerah melaksanakan kebijakan stabilitas pasokan dan harga pangan.** 

#### ALAT UKUR KETERSEDIAAN PANGAN

Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ketersediaan pangan diukur dari dua hal, yaitu kuantitas dan kualitasnya.

Kuantitas pangan mengukur tingkat jumlah pangan yang tersedia, sedangkan kualitas pangan mengukur tingkat keberagaman jenis pangan yang tersedia pada setiap kelompok pangan.

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan menjadi sasaran yang tercantum pada dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJMN 2015-2019 dan Rencana Aksi Pangan Nasional (atau Daerah) Pangan dan Gizi 2015-2019.

Sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 7 UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, salah satu referensi dalam perencanaan pembangunan ketersediaan pangan daerah adalah perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Maka, dengan pemahaman ketersediaan pangan adalah **prasyarat bagi konsumsi pangan masyarakat yang baik** (Gambar 1), maka pencapaian konsumsi pangan pada rencana pembangunan pangan nasional dan daerah

"sudahkah
rencana
pembangunan
daerah Anda
mencantumkan
sasaran
ketersediaan
pangan?"

dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah memenuhi ketersediaan pangan.

Kita juga telah memaklumi bersama bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur ketersediaan pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM). Tulisan ini tidak membahas kembali secara mendetail teknis perhitungan NBM, tapi lebih membahas pemanfaatannya sebagai sasaran kinerja pemerintah daerah.

NBM dapat memotret penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan pada suatu wilayah dalam satu tabel. NBM juga berperan sebagai instrumen yang luwes, angka konversinya dapat kita sesuaikan dengan daerah masing-masing.

Tabel 1 Sasaran pembangunan pangan yang Tercantum pada RPJMN 2015-2019

Komoditi	2014 (baseline)	Target 2019	Rata2 Pertumbuhan 2015-2019 (%)	Potensi pencapaian skor PPH dari target produksi		
1. Produksi						
a. Padi (juta ton)	70,6	82,0	3,03	25		
b. Jagung (juta ton)	19,1	24,1	4,7			
c. Kedelai (juta ton)	0,9	2,6	22,7	10		
d. Gula (juta ton)	2,6	3,8	8,3	2,5		
e. Daging sapi (ribu ton)	452,7	755,1	10,8	24		
f. Ikan (di luar rumput laut-juta ton)	12,4	18,8	8,7			
2. Konsumsi						
a.Konumsi energi (Kal/kap/hr)	1.967	2.150				
b.Konsumsi ikan (kg/kap/th)	38,0	54,5	7,5			
3. Skor PPH	81,8	92,5		$\Sigma = 61,5$		

Tabel 2 Outcome RAN(D)PG 2015 - 2019

No	Indikator	Status awal (2014)	Target 2019
1	Ketersediaan energi (Kap/kap/hr)	4.130	<mark>2.400</mark>
2	Konsumsi energi (Kal/kap/hr)	1.949	2.150
3	Ketersediaan protein (g/kap/hr)	<mark>87,04</mark>	<mark>63</mark>
4	Konsumsi protein (g/kap/hr)	56,60	57
5	Skor PPH ketersediaan	_	<mark>96,32</mark>
6	Skor PPH Konsumsi	83,40	92,50

Pemaparan ini menjelaskan output NBM dimanfaatkan lebih dekat sebagai **alat evaluasi**, mengukur apakah jumlah dan kualitas pangan yang tersedia sudah memenuhi standar ideal atau belum.

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana NBM dapat berperan sebagai instrumen perencana sekaligus instrumen evaluasi ketersediaan pangan wilayah, dan bahkan outputnya dapat menjadi alat ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah bidang ketahanan pangan?

#### SUDAH SEBERAPA EFEKTIFKAH INSTRUMEN ANDA?

Beberapa kasus kami jumpai pada beberapa daerah, analisis ketersediaan dengan NBM **berhenti** sebagai alat evaluasi.

Analisis hanya menyajikan berapa besar kuantitas dan kualitas pangan yang tersedia. Prestasi ini masih belum bisa menjawab bahwa tuntuan pembangunan ketahanan pangan tidak bisa berhenti di satu institusi saja, yaitu Dinas

"Prestasi ini masih
belum bisa
menjawab bahwa
tuntuan
pembangunan
ketahanan pangan
tidak bisa
berhenti di satu
institusi saja"

Ketahanan Pangan.

Output NBM meliputi kuantitas ketersediaan, yang ditunjukkan dengan besar energi dengan satuan kilokalori per kapita per hari dan besar protein dengan satuan gram per kapita per hari, dan kualitas ketersediaan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Satuan-satuan ini **tidak dimengerti sebagian instansi** yang masuk dalam irisan urusan ketahanan
pangan daerah, misalnya Dinas Pendidikan atau Dinas

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Perdagangan dan Industri, bahkan Bulog yang tupoksinya secara awan dimengerti penyokong ketahanan pangan secara langsung.

Maka, instrumen ketersediaan pangan wilayah perlu di-upgrade.

la tidak hanya sebagai alat evaluasi ketersediaan pangan wilayah, tapi meliputi pula alat perencanaan, dan memiliki satuan yang dimengerti oleh lintas instansi.

Perhitungan teknis yang dimengerti lintas instasi disajikan dalam:

- ✓ satuan produksi (ton/tahun),
- ✓ satuan faktor produksi utama produksi (hektar),
- ✓ biaya penyediaan pangan (Rp)/tahun, dan
- ✓ instansi spesifik yang menangani setiap komoditas.

Simulasi perhitungan teknis ini insyaallah akan disiarkan melalui channel Youtube Pangan Lokal Indonesia.

dapat disaksikan melalui link berikut:

### https://youtu.be/mobxpU7eWKU

Dengan dokumen perencanaan yang 'dapat dibaca' lintas instansi, progres pembangunan pangan di daerah Anda diharapkan memeroleh akselerasi.

#### APA YANG BISA ANDA LAKUKAN SEKARANG?

 Advokasi skor PPH konsumsi menjadi standar kinerja pemerintah daerah dalam baik RPJMD maupun RADPG, baik Renstra Dinas maupun Renja Dinas.

Saat ini, beberapa daerah baru saja melalui euforia pemilihan pimpinan darah yang baru. Pimpinan daerah yang baru berarti RPJMD yang baru. Maka, inilah saat yang tepat ketahanan pangan menjadi sasaran dan indikator kinerja pemerintah daerah.

Kami menemui kasus pada sebagian daerah bahwa pimpinan daerah sudah menentukan isu strategis pembangunan wilayah,

misalnya pariwisata.

Pariwisata membutuhkan penyediaan pangan untuk turis, baik sebagai akomodiasi maupun sebagai oleh-oleh.

Contoh lainnya, pimpinan daerah sudah menentukan isu strategis pembangunan wilayah adalah kesehatan.

Salah satu indikator kesehatan adalah obesitas.

Dari sini, kita bisa menyisipkan program konsumsi pangan sesuai kaidah gizi seimbang.

"Ketahanan pangan bisa saja tidak selalu menjadi kendaraan utama pembangunan daerah, tapi tetap harus menjadi bahan bakarnya."

Ebook ini disusun oleh tim Pangan Lokal Indonesia dan didedikasikan untuk pembangunan ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Dari contoh kasus-kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada ego sektoral di sini. Setiap sektor saling berhubungan, terutama terhadap pangan.

Ketahanan pangan bisa saja tidak selalu menjadi kendaraan utama pembangunan daerah, tapi tetap harus menjadi bahan bakarnya.

2. Revitalisasi peran dan fungsi dewan ketahanan pangan, lebih utama melebur dengan tim-tim perencana di wilayah.

Garbage in Garbage Out dan Data Mencerdaskan Bangsa adalah dua kaidah statistik

yang perlu menjadi perhatian serius bagi setiap kita.

"Garbage In Garbage Out"

Salah data akan menyebabkan salah analisis. Salah Analisis akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat.

Data untuk analisis ketersediaan pangan meliputi data sekunder yang bersumber dari lintas instansi. Publikasi resmi dan kontinyu memang menjadi pegangan

dalam pemilihan data yang reliabel, meski begitu, data teknis yang berada di Dinas

Teknis, yang berbeda dengan publikasi BPS, **sering menjadi bahan perdebatan hangat.** 

Akhirnya, ekspose hasil analisis lebih konsen kepada validitas data, bukan kebijakan apa yang bisa kita susun untuk disarankan kepada pimpinan daerah.

Perangkat pemerintah membentuk berbagai tim untuk menjamin kelancaran pembangunan wilayah. Ada banyak nama dan singkatannya, tapi anggotanya mirip satu dengan yang lain.

Revitaliasi lembaga yang pernah disusun lebih baik dan efisien daripada membentuk yang baru. Salah satu kelembagaan yang siap lepas landas adalah Dewan Ketahanan Pangan. Nah, sampai mana peran Dewan Ketahanan Pangan di daerah Anda?

3. Analisis tiap tahun difokuskan untuk menyesuaikan target.

Setelah proses advokasi ketahanan pangan menjadi sasaran pembangunan berhasil, tahap selanjutnya adalah menjadikannya batu pijakan untuk analisis ketersediaan pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehingga, ada kemungkinan jumlah ketersediaan protein menurun sebanyak dua kali lipat pada tahun dasar analisis+3. Namun, di sisi lain, hal tersebut bukan menjadi masalah besar karena pada hasil analisis tahun dasar+2 menunjukkan ketersediaan protein surplus hingga tiga kali lipat.

Dengan kata lain, kebijakan pada tahun dasar analisis+2 dapat dikatakan berhasil. Karena ketersediaan protein yang telah surplus merupakan peluang usaha daerah untuk melakukan **ekspor protein** kepada daerah yang defisit protein. Selain itu, realokasi anggaran juga dikatakan berhasil. Karena alokasi anggaran telah dialihkan kepada peningkatan skor PPH yang masih defisit pada tahun dasar analisis+2.

Dan intepretasi lainnya.

Saat kondisi seperti ini, ritme pembangunan ketahanan pangan mengalami akselerasi. Kinerja pemerintah daerah untuk memenuhi pangan **setiap individu** yang berada di wilayahnya semakin membaik.

-selesai-

Insyaallah bersambung ke edisi 02 dengan tema pembahasan yang lebih menarik.